

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Subak sebagai bagian dari budaya Bali adalah organisasi sosial yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya dalam mengatur penggunaan air untuk irigasi sawah, sehingga perlu diakui dan dihormati keberadaannya bersama dengan hak-hak tradisionalnya (Wibawa, 2019). Subak sebagai organisasi tradisional memang sudah dikenal mancanegara. Sebagai organisasi yang mengurus tentang sistem irigasi tradisional, Subak juga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yaitu rice terrace (sawah berteras) atau Subak Bali-Landscape yang umumnya tersusun atas petak sawah yang bertingkat-tingkat atau berundak-undak menyerupai anak tangga yang tidak berukuran, pemandangan itulah yang menyuguhkan para wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali.

Keberadaan subak sudah mendapat pengakuan berdasarkan hukum nasional Indonesia. Penjelasan atas Pasal 34 ayat (3) (b) 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Air memberikan penjelasan bahwa kekhasan daerah adalah sifat khusus tertentu yang hanya ditemukan di suatu daerah, bersifat positif dan produktif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti misalnya

kekhasan di bidang kelembagaan masyarakat pemakai air untuk irigasi yakni Subak di Bali.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan pengaturan yang berkaitan dengan keberadaan Subak yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak. Perda ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa untuk melestarikan Lembaga Subak berdasarkan falsafah Tri Hita Karana sebagai organisasi sosial dalam bidang pertanian yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali maka kedudukan, fungsi dan peranannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Selain itu, Perda Subak ini disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum terkini.

Pada penjelasan bagian umum Perda Subak termuat latar belakang mengapa peraturan ini disusun, yakni bahwa pengakuan dan penghormatan dapat diatur dengan peraturan untuk meningkatkan eksistensi subak yang selama ini sudah dirasakan manfaatnya secara positif terutama dalam mengatur anggota (krama) dan wilayah (palemahan) secara intern maupun dalam membantu program-program pemerintah di bidang pembangunan.

Perubahan karakter mata pencaharian masyarakat semakin meningkat, yaitu dari agraris ke jasa (Erayani, 2020). Peluang pekerjaan jasa di bidang pariwisata ini mengundang para urban ke Bali. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya alih fungsi lahan untuk kebutuhan tempat tinggal yang menggunakan lahan pertanian, khususnya di perkotaan. Tekanan alih fungsi sangat tinggi di perkotaan karena tanah sudah menjadi komoditas ekonomis dan permainan pelaku

bisnis. Alih fungsi lahan yang meningkat didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan perilaku hedonisme masyarakat yang relatif tinggi (Ndawa., 2014)

Gambar A1. Laju Pertumbuhan Penduduk Bali Sumber : BPS (2021)

### Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Hasil Sensus Penduduk

#### *Population Growth Rate per Year Result of Population Census*

Kabupaten/Kota	1961 – 1971	1971 - 1980	1980 - 1990	1990 - 2000	2000 - 2010	2010 - 2020
Jembrana	2,91	1,77	0,60	0,63	1,22	1,88
Tabanan	1,85	0,44	0,19	0,73	1,13	0,90
Badung	2,60	2,34	1,23	2,33	4,62	0,09
Gianyar	1,58	1,20	0,96	1,56	1,80	0,90
Klungkung	0,87	0,66	0,12	0,31	0,94	1,89
Bangli	1,11	1,56	0,88	0,94	1,06	1,79
Karangasem	0,23	1,63	0,89	0,49	0,96	2,12
Buleleng	2,27	1,90	1,04	0,33	1,12	2,33
Denpasar	-	-	4,05	3,20	4,01	- 0,81
<b>BALI</b>	<b>1,77</b>	<b>1,54</b>	<b>1,18</b>	<b>1,26</b>	<b>2,14</b>	<b>1,01</b>

Berdasarkan data BPS, Pada Tahun 2010 – 2022 jumlah penduduk Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya laju alih fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan

pembangunan di Kabupaten Buleleng.



Gambar 1.1 Rata-Rata Laju Pengurangan La 1

Berdasarkan data diatas dinyatakan bahwa di tahun 2013 – 2017 masing - masing kabupaten di Bali mengalami peningkatan pengurangan lahan sawah yang variatif. Rata - rata pengurangan lahan tertinggi terjadi di Kabupaten Tabanan yaitu 273,75 dan pengurangan lahan yang paling rendah terjadi di Kabupaten Bangli dengan rata – rata 8,5 sedangkan Kabupaten Buleleng berada pada peringkat dua yaitu rata – rata 142,25.

Konversi lahan yang terjadi semakin besar setiap tahunnya dapat mengancam keberlanjutan subak. Hal ini disebabkan oleh subak yang berhubungan dengan tanah yang merupakan tempat bagi masyarakat yang menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pelaksanaan upacara pada subak (Nggauk, 2011)

Penyebab berkurang bahkan musnahnya beberapa subak adalah hilangnya satu atau lebih unsur penciri THK dalam sistem subak. Unsur-unsur yang dimaksud adalah hilangnya sistem fisik, seperti lahan sawah, tata tanam, sarana, dan prasarana jaringan irigasi. Tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan sektor

kepariwisataan berbasis modal (*capital-based tourism*) di Bali telah banyak membawa dampak negatif pada subak. Dampak negatif tersebut akan menimbulkan berbagai perubahan bentuk, motif sosial subak, dan memberikan fungsi dan peranan yang berbeda dari subak pada mulanya. Banyak lahan sawah pada subak telah berubah fungsi menjadi bangunan akomodasi pariwisata, hotel, restoran, pengembangan perumahan serta industri kerajinan dan manufaktur (Sedana, 2013)

Areal persawahan Bali yang terkenal dengan sistem organisasi subaknya kini mulai terancam dengan banyaknya aktifitas pembangunan pariwisata yang mengorbankan persawahan. Tataran realitas ternyata kebijakan pembangunan pariwisata yang telah dikembangkan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, dan mengabaikan kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat.

Pembangunan pariwisata yang baik hendaknya memperhatikan aspek lainnya, dengan tidak mendahulukan kepentingan yang dianggap menguntungkan tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi kedepannya (Fajar Kartika Lestari, P., Windia, W. & Sri Astiti, 2015)

Pariwisata telah mampu meningkatkan peluang untuk penghidupan, sehingga tekanan penduduk di sektor pertanian berkurang akibatnya kesenjangan yang lebar terjadi antara sektor pertanian dan pariwisata (Suyastiri, 2012). Perkembangan pariwisata khususnya di Indonesia kini semakin pesat. Pariwisata dianggap mampu memberikan keuntungan besar bagi negara sehingga pengembangannya menjadi salah satu fokus pemerintah. Banyak atraksi wisata baru dikembangkan dari beragam destinasi wisata di Indonesia. Meskipun pariwisata Bali sudah lama berkembang dan dikenal dunia, namun pemerintah masih menganggap diperlukannya pembenahan dan beragam pembangunan untuk menunjang aktifitas pariwisata di Bali. Pengembangan pariwisata harus didukung oleh semua aspek dan

fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata lainnya seperti: tempat penginapan (sarana akomodasi: misalnya hotel, villa, dan lainlain), restaurant, travel agent, money changer, alat transportasi, infrastruktur, serta destinasi pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Namun, saat ini pembangunan pariwisata justru berperan besar dalam terjadinya kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah tergerusnya areal persawahan khususnya di Bali.

Wilayah Buleleng masuk dalam jumlah alih fungsi lahan yang tinggi, Subak Banyumala mempunyai sistem pengairan  $\frac{1}{2}$  teknis, asal sumber air dari Tukad Banyumala, dan bendungannya terletak di Dusun Babakan, Desa Sambangan yang berada di Jalan Srikandi Gang Leli. Luas baku Subak Banyumala adalah 55 Ha, dengan jumlah anggota subak hingga tahun 2020 adalah 45 orang. Kegiatan usaha tani yang dilaksanakan adalah pertanian tanaman pangan dengan pola tanam Padi – Padi – Palawija/tembakau.

Fungsi dari irigasi ini sangatlah penting didalam dunia pertanian. Irigasi dimanfaatkan oleh petani khususnya petani padi sawah untuk mengairi dan menjaga kecukupan air, khususnya di lahan sawah Subak Banyumala. Tanpa adanya jaringan irigasi tersier, maka aliran air dari sumber air tersebut, tidak akan bisa sampai ke lahan sawah dan tidak bisa dimanfaatkan oleh petani. Oleh karena itu, jaringan irigasi tersier adalah komponen mutlak dalam jaringan sistem irigasi. Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan luas areal tanam. yaitu pengelolaan air irigasi dari hulu (up stream) sampai dengan hilir (down stream) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai.

Kelian Subak merupakan Ketua Subak yang mempunyai kewajiban memimpin suatu subak. Dalam kesehariannya, Kelian Subak akan bertugas memimpin rapat-

rapat subak, yang materi rapatnya dapat berupa penetapan peraturan subak, pengaturan air, penanganan konflik/sengketa jika ada, pengaturan upacara keagamaan yang terkait dengan subak, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain (lembaga) di tingkat desa dan kecamatan agar subak dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Selain itu, pengurus Subak Banyumala memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Strategi Pengembangan Subak Banyumala Dalam Mengurangi Laju Alih Fungsi Lahan Kabupaten Buleleng.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka identifikasi dari permasalahan pada penelitian ini adalah wilayah Buleleng masuk dalam jumlah alih fungsi lahan yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya laju alih fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Tekanan alih fungsi sangat tinggi di perkotaan karena tanah sudah menjadi komoditas ekonomis dan permainan pelaku. Pembangunan pariwisata justru berperan besar dalam terjadinya kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah tergerusnya areal persawahan khususnya di Buleleng. .

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Luasnya masalah yang dapat teridentifikasi, penting dikemukakan pembatasan masalah dalam penelitian ini sehingga kajian yang dilakukan menjadi lebih focus. Dilihat dari objeknya, penelitian ini mengkaji tentang strategi pengembangan Subak Banyumala dalam mengurangi alih fungsi lahan. Dilihat dari subjeknya, penelitian ini hanya melibatkan pengurus dan anggota Subak Banyumala. Sementara dilihat dari keilmuannya, pengkajian dilakukan menggunakan perspektif Geografi Pertanian, yaitu berkenaan dengan strategi pengembangan pertanian untuk mengurangi alih fungsi lahan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana potensi Subak Banyumala dalam mengurangi laju alih fungsi lahan di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana strategi pengembangan subak Banyumala dalam mengurangi alih fungsi lahan atau mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Buleleng ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui potensi Subak Banyumala dalam dalam mengurangialih fungsi lahan di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk meluarkan strategi pengembangan subak Banyumala dalammengurangi alih fungsi lahan atau mempertahankan lahan pertanian.

## **1.6 Manfaat**

### **1.6.1 Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris bagi ilmu pengetahuan di bidang geografi pertanian khususnya potensi potensi Subak Banyumala dalam dalam mengurangialih fungsi lahan di Kabupaten Buleleng dan strategi pengembangan subak Banyumala dalam mengurangi alih fungsi lahan atau mempertahankan lahan pertanian

### **1.6.2 Manfaat Secara Praktis**

1. Melalui penerapan strategi Subak Banyumala yang berkelanjutan, petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Pengembangan praktik pertanian yang lebih efisien dan produktif dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi.
2. Dengan memperkuat praktik pertanian berbasis Subak Banyumala, akan tercipta kesadaran dan komitmen untuk mempertahankan lahan pertanian. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan dan insentif untuk mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian atau untuk pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan.